

**PERALIHAN MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT SAROLANGUN: DARI PETANI
KARET KE PENAMBANG EMAS**
**LIVELIHOOD TRANSITION OF THE SAROLANGUN COMMUNITY: FROM RUBBER
FARMERS TO GOLD MINERS**

Irhas Fansuri Mursal¹, M. Ali Munazir², Gusmira Wita³ Ulul Azmi⁴

^{1,2}Universitas Jambi, Jambi

³Universitas Negeri Padang, Padang

⁴Universitas Batanghari, Jambi

Email: irhas.fansuri@unja.ac.id

ABSTRAK

Perubahan struktur ekonomi masyarakat pedesaan seringkali dipengaruhi oleh dinamika harga komoditas dan tekanan terhadap sumber penghidupan utama. Artikel ini mengkaji peralihan mata pencaharian masyarakat Sarolangun, Provinsi Jambi, dari perkebunan karet ke penambangan emas rakyat. Sebagai respons terhadap ketidakstabilan ekonomi dan perubahan kondisi sosial dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kemunculan awal perkebunan karet rakyat, menganalisis perkembangan hingga menjelang krisis ekonomi 1997, serta mengidentifikasi proses dan faktor yang mendorong transisi menuju aktivitas penambangan emas. Dengan menggunakan pendekatan narative review dan fenomenologi, artikel ini mensintesis temuan berbagai temuan-temuan dari studi ilmiah terkini untuk menggambarkan karakteristik sistem produksi karet, hambatan struktural dalam sektor agraria serta pergeseran ke sektor ekstraktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurunnya produktivitas karet, fluktuasi harga global, serta lemahnya kelembagaan pasar lokal mendorong masyarakat untuk mengadopsi strategi ekonomi alternatif yang lebih likuid dan cepat, yaitu menambang emas secara tradisional. Temuan ini juga memperlihatkan bahwa transisi tersebut berdampak terhadap relasi sosial, struktur ekonomi rumah tangga dan keberlanjutan lingkungan setempat.

Kata Kunci : *Peralihan mata pencaharian; karet rakyat; penambangan emas rakyat; Sarolangun.*

ABSTRACT

Structural transformations in rural economies are often driven by commodity price dynamics and external pressures on primary livelihoods. This article examines the livelihood transition of the Sarolangun community, Jambi Province, from smallholder rubber plantations to artisanal gold mining as a response to economic instability and shifts in the socio-environmental landscape. The study aims to explain the initial emergence of smallholder rubber cultivation, analyze its development leading up to the 1997 economic crisis, and identify the processes and driving factors behind the shift toward gold mining activities. Employing a narrative literature review approach and phenomenology, this article synthesizes findings from recent scholarly works to depict the characteristics of rubber production systems, structural challenges within the agrarian sector, and the socioeconomic drivers of the transition to extractive livelihoods. The results reveal that declining productivity, global price fluctuations, and weak market institutions compelled communities to adopt more liquid and immediate income strategies, notably traditional gold mining. This transition has significantly altered social relations, household economic structures, and the local ecological balance.

Keywords : *Livelihood transition; smallholder rubber; artisanal gold mining; Sarolangun.*

PENDAHULUAN (TNR 11)

Perkebunan karet rakyat di Sarolangun memiliki akar sejarah sejak masa kolonial Hindia Belanda. Pada awal abad ke-20, meningkatnya harga karet global dan kebijakan ekonomi kolonial yang mendorong ekspansi komoditas ekspor menyebabkan tanaman karet mulai di perkenalkan ke wilayah Jambi, termasuk Sarolangun. Meski semula dikelola oleh perkebunan besar swasta maupun pemerintah kolonial. Setelah tahun 1912 masyarakat lokal mulai mengembangkan kebun karet secara mandiri, meskipun skalanya kecil (Lindayanti, 1993).

Pertumbuhan ini dipicu oleh faktor ekonomi dan aksesibilitas lahan yang tersedia luas, serta pola tanam sederhana yang sesuai dengan karakter petani lokal. Perkebunan karet menyebar hampir di seluruh wilayah Jambi dan mata pencaharian utama masyarakat pedesaan. Di Sarolangun sendiri, khususnya *onderdistrik* Pauh, karet sudah menjadi komoditas dominan sejak 1928. Ini menunjukkan tingkat adopsi yang tinggi oleh petani lokal (Lindayanti, 1993).

Perkebunan karet rakyat di Sarolangun mengalami perkembangan signifikan pada era Orde

Baru, terutama antara 1970 hingga 1977. Pada masa ini, harga karet cenderung meningkat, sehingga memberikan insenti ekonomi yang kuat bagi masyarakat untuk memperluas kebun dan meningkatkan produksi. Misalnya, pada tahun 1987, harga karet naik sebesar 61,15% dibandingkan sebelumnya (Mubyarto, 1990). Pada tahun 1982 menunjukkan bahwa luas perkebunan karet di Kabupaten Sarolangun Bangko mencapai 164.870 hektar atau 12,49% dari total luas wilayah, menjadikannya penggunaan lahan terbesar kedua setelah hutan (Mimin Arifin et al., 1986). menjadi 182.254 hektar pada tahun 1994, dengan produksi mencapai 63.918 ton (BPS Sarolangun Bangko, 1999).

Faktor pendorong pertumbuhan ini termasuk dukungan teknologi lokal, pelatuaahn petani, program peremajaan karet. Inovasi seperti penyuluhan pola sadap, dan pengelolaan pasca panen terbukti meningkatkan produktivitas (Yardha, 2022). Peralihan mata pencaharian dari karet kepenambangan emas terjadi secara bertahap dan di pengaruhi oleh kombinasi faktor ekonomi, kebijakan, serta dinamika lokal. Pada tahun 1984, hasil penyadapan karet masih lebih menguntungkan dibandingkan aktivitas tambang emas tradisional, karena emas waktu itu hanya Rp 600 per seting, sedangkan harga karet mencapai Rp 476,67/kg (Ulul Azmi, 2016).

Namun, ketika harga karet menurun pada akhir 1980-an dan pertengahan 1990-an banyak masyarakat mulai beralih ke sektor lain seperti penebangan kayu ilegal (*babelok*). Katika aktivitas ini dilarang secara ketat oleh pemerintah pada tahun 1999-1000, masyarakat kembali mengalami krisis mata pencaharian, karena kebun-kebun karet yang mereka tinggalkan menjadi tidak produktif lagi (Ulul Azmi, 2016).

Krisis ekonomi 1997 turut memperburuk situasi. Harga karet merosot drastis menjadi Rp. 1.050/Kg, sementara harta emas melonjak dari Rp 159.175 per gram pada Januari tahun 1998 menjadi Rp. 201.500 pada Februari 1998 (BPS Sarolangun Bangko, 1998). Kenaikan ini menarik kembali minat masyarakat untuk menambang emas, apalagi dengan masuknya teknologi baru yang memungkinkan efisiensi tambang rakyat.

Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa harga global karet sangat berkorelasi dengan perluasan dan degradasi hutan di Jambi, termasuk Sarolangun. Ketika harga karet rendah, petani cenderung mencari penghasilan alternatif, termasuk tambang emas ilegal, yang berdampak pada perubahan tata guna lahan dan kerusakan lingkungan. (Jayathillake, 2024).

Secara sosial, perubahan ini juga memperlihatkan pergeseran dari pertanian berbasis komunitas ke pekerjaan individu berbasis komunitas ke pekerjaan eksploitasi sumber daya. Banyak penduduk beralih ke tambang karena lebih cepat menghasilkan uang, meskipun beresiko tinggi dan berdampak buruk pada kesehatan dan lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan narative review dan fenomenologi untuk melihat fenomena peralihan ekonomi masyarakat Sarolangun. Dalam tradisi metodologi Ilmu Sosial, Fenomenologi dipandang sebagai salah satu inovasi karena berhasil melepaskan diri dari keharusan penggunaan hipotesis dan kerangka penyusunannya. Pendekatan ini dalam beberapa aspek masih menunjukkan pengaruh dari paradigma positivistik. Pemikiran kritis kemudian berkembang berfokus pada bagaimana fenomenologi sebagai pendekatan dalam ilmu sosial dapat menempatkan dirinya sejajar dengan pendekatan lainnya (Gusmira Wita et al, 2022).

Penelitian ini menggunakan penelitian sejarah yang dilakukan oleh para peneliti dengan tujuan utama untuk memahami peristiwa-peristiwa masa lalu, serta mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut baik dari kegagalan maupun keberhasilan yang pernah terjadi. Selain itu, kajian sejarah memiliki nilai penting bagi manusia dalam menelaah masa lampau untuk menilai kemungkinan penerapan peristiwa tersebut di masa depan melalui analisis historis. Dalam penulisan ini, penulis menerapkan empat tahapan metode sejarah, yaitu, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Adapun Sumber sumber yang digunakan dalam kajian ini, mencakup buku atau laporan sejaman, Tesis serta artikel yang diterbitkan di jurnal (Bela Wahyuni et al, 2022). Untuk mendapatkan memori historis peneliti juga melakukan wawancara dengan nasasumber yang paling berdekatan dengan peristiwa masa lalu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kemunculan Awal Perkebunan Karet di Sarolangun.

Kegiatan perkebunan karet rakyat di Jambi, termasuk Sarolangun, berkembang sejak era kolonial dan menjadi bentuk utama pemanfaatan lahan oleh masyarakat. Karakteristik utama sistem ini adalah skala kecil, pola tanam monokultur, dan penggunaan teknik penyadapan tradisional. Produktivitas perkebunan rakyat masih terbatas, dengan rata-rata hasil antara 1–1,2 ton/ha/tahun, dan potensi maksimal

mencapai 2 ton/ha/tahun bila dioptimalkan dengan teknologi site-specific (Yarhaet al., 2022). Kegiatan perkebunan karet rakyat di Jambi, termasuk Sarolangun, berkembang sejak era kolonial dan menjadi bentuk utama pemanfaatan lahan oleh masyarakat. Karakteristik utama sistem ini adalah skala kecil, pola tanam monokultur, dan penggunaan teknik penyadapan tradisional. Produktivitas perkebunan rakyat masih terbatas, dengan rerata hasil antara 1–1,2 ton/ha/tahun, dan potensi maksimal mencapai 2 ton/ha/tahun bila dioptimalkan dengan teknologi site-specific (Yardha et., 2022).

Kolonial Belanda dengan kebutuhan pasar global karet pada masa awal abad ke 20 mendorong introduksi tanaman karet ke Wilayah Jambi, termasuk Sarolangun. Karet telah menjadi mata pencarian utama rakyat Jambi dan hampir terdapat di seluruh Jambi. Tahun 1928 di distrik Sarolangun, di *onderdistrict* Pauh hampir seluruh penduduk tergantung pada perkebunan karet.

Tabel 1. Persentase Keluarga yang Bermata Pencarian Utama Karet Pada Beberapa Marga di Sarolangun Tahun 1928

Daerah	Persentase
<i>Onderdistrict</i> Pauh:	
Marga Batin IV	56%
Marga Simping III	48%
Marga Air Itam	45%
<i>Onderdistrict</i> Sarolangun:	
Marga Sarolangun	30%
Marga Pelawan	25%
Marga Batin III	20%
<i>Onderdistrict</i> Limun:	
Marga Cerimin Gedang	20%
Marga Datuk nan Tiga	15%
Marga Bukit Bulan	4%

Sumber: *Mvo. Onderafdeeling Sarolangun* no: 911, hal.22.

Menurut data tahun 1928, ada 27 pemilik kebun karet di distrik Sarolangun yang memiliki 2.000 pohon. Jumlah 27 orang itu terdiri atas 14 orang di *Onderdistrict* Pauh, 9 orang di *onderdistrict* Sarolangun, dan 2 orang lagi terdapat di *Onderdistrict* Batang Asai (*Mvo*, 1928).

Pada tahun 1970 hingga tahun 1988 perkebunan karet sempat memiliki peranan penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat, bahkan menjadi pekerjaan utama masyarakat. Semakin bergairahnya perekonomian sektor perkebunan karet, karena periode tersebut harga karet sering mengalami kenaikan. Bahkan tahun 1987 harga karet mengalami

kenaikan yang signifikan, yaitu sebesar 61,15 % dari tahun 1986. Tahun 1986 harga karet hanya Rp. 491,25/kg, pada tahun 1987. Harga karet di Jambi telah mencapai Rp. 791, 67/kg. (Mubyarto, 1990).

Dinamika Perkembangan dan Kendala Sistem Perkebunan.

Kebijakan perdagangan 1 April 1976 mengatur biaya-biaya barang ekspor, penghapusan pajak daerah terhadap barang-barang ekspor. Pungutan atas bahan olahan karet sebesar 10% oleh pemerintah pusat diturunkan menjadi 5%. Kemudian pungutan 10% oleh pemerintah marga dan pemerintah daerah atas getah yang diusahakan oleh petani dihapuskan. Kebijakan tersebut berimplikasi juga terhadap semakin meningkatnya keinginan masyarakat untuk melakukan usaha tani karet.(Mubyarto, 1990).

Dari tahun 1990-an hingga krisis ekonomi Asia, sektor karet mengalami perkembangan pesat namun juga mulai menunjukkan kerentanan. Efisiensi teknis petani karet di Sarolangun dan wilayah Jambi lainnya masih rendah; rerata produktivitas sebesar 865 kg/ha/tahun, jauh di bawah potensi optimal. Tingkat efisiensi produksi sangat dipengaruhi oleh usia petani, pengalaman bertani, dan adopsi teknologi pertanian modern (Kuswanto et al., 2019).

Fluktuasi harga global sangat berdampak terhadap stabilitas sektor ini. Studi longitudinal menunjukkan bahwa penurunan harga karet secara signifikan menurunkan produktivitas dan mendorong masyarakat mencari mata pencaharian alternatif (Jayathilake et, al., 2024). Sementara itu, konversi hutan menjadi lahan perkebunan juga menurunkan kualitas lingkungan, termasuk berkurangnya makroporositas tanah dan peningkatan erosi (Utami at al, 2021).

Perubahan Ekonomi dan Tekanan Struktural

Transformasi struktural yang terjadi di wilayah Sarolangun tidak terlepas dari ketimpangan pendapatan antar sektor. Studi menunjukkan bahwa walaupun sektor karet tetap dominan sebagai penyumbang PDRB di pedesaan, pendapatan riil petani karet cenderung tidak meningkat, dengan indeks NTPRP < 1 (0.97), yang berarti pengeluaran rumah tangga lebih besar dari pendapatan usaha tani (Kuswanto et al., 2019).

Ketika produktivitas menurun dan harga komoditas anjlok, masyarakat mengalihkan pilihan ekonominya ke sektor lain, termasuk illegal logging dan pertambangan emas rakyat. Penelitian ekonomi regional menempatkan Sarolangun sebagai daerah berkembang cepat namun tetap menghadapi tekanan ketimpangan antar sektor produktif. (Ms, 2018).

Transisi Ke Penambangan Emas Rakyat

Sebagian besar wilayah yang dilintasi Sungai Batang Limun merupakan dataran tinggi. Hampir 50% kawasannya perbukitan, mulai dari Dusun Bukit Melintang, Desa Napal Melintang, Desa Lubuk Bedorong, Bukit Tinjau Limun (667 meter), sampai Dusun Kampung Manggis, dan Dusun Simpang Maloko (Selayang Pandang Kabupaten Sarolangun, 1970).

Sepanjang kawasan ini pola dan model *tambang layau* dan *tambang jarung* sebenarnya sudah dikenal oleh masyarakat, tetapi belum begitu populer, dan hanya terdapat beberapa kelompok penambang saja yang menggunakan model ini. (Pemda Tingkat II Sarolangun Bangko, 1983). Beberapa dusun yang sebagian masyarakatnya sudah menjadikan aktivitas penambangan emas dengan model *tambang layau* dan *tambang jarung* sebagai mata pencaharian utama, di antaranya Dusun Mengkadai, Dusun Kait-Kait, Dusun Tanjung Putus, Dusun Muara Kutur, Dusun Tebing Tinggi, Dusun Sungai Benteng dan Dusun Sungai Siluak. (Wawancara Abdul Muis, 2022).

Penghasilan yang didapat oleh penyadap karet dapat digolongkan sebagai pendapatan tetap, karena aktivitas ini bisa dilaksanakan setiap hari, kecuali ketika keadaan cuaca sedang hujan, masyarakat tidak bisa melakukan aktivitas penyadapan. Biasanya disaat waktu tidak menyadap karet ini dimanfaatkan oleh penduduk untuk *ngerai* atau menambang emas. Walaupun pada umumnya masyarakat banyak mengalihkan mata pencahariannya sebagai petani karet. Namun sepanjang tahun 1970-1999 juga ada sebagian kecil masyarakat yang bekerja menambang emas. Beberapa dusun kawasan Limun telah melakukan aktivitas penambangan emas dengan cara membuat sumur atau model *tambang layau* dan *tambang jarung*. Namun demikian intensitas penambangan dan masyarakat yang bekerja sebagai penambang

emas hanyalah sebagian kecil. Masyarakat lebih tertarik menjalankan aktivitas sebagai penyadap karet.

Pada tahun 1989 dan tahun 1997, saat harga karet turun drastis sebagian penduduk mengalihkan mata pencahariannya sebagai penebang kayu atau *bebalok*. Bagi penduduk yang *bebalok* kebun-kebun karet rakyat yang sebelumnya menjadi mata pencarian andalan ditinggalkan begitu saja dan tidak dirawat lagi. Namun pada saat aktivitas *bebalok* ditertibkan dan dilarang oleh pemerintah, di Kecamatan Limun penertiban besar-besaran terjadi tahun 1999-2000. Masyarakat kehilangan mata pencaharian, karena di samping pelarangan melakukan aktivitas *bebalok*, kebun-kebun karet yang telah ditinggalkan tidak produktif lagi. Jumlah kebun karet rakyat yang ada tidak seimbang lagi dengan jumlah penduduk. Sejak maraknya aktivitas *bebalok*, penanaman kebun karet baru tidak dilakukan. (Wawancara Muhidin, 2022).

Faktor penting yang juga menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk kembali mengusahakan penambangan emas secara besar-besaran adalah kenaikan harga emas sebagai salah satu implikasi dari krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997. Kemudian ditambah lagi kurangnya lahan perkebunan karet dan turunnya harga karet rakyat pada tahun tersebut. (Wawancara Sayful, 2022). Sepanjang tahun 1998 harga emas terus mengalami kenaikan bulan Januari harga emas masih berkisar Rp. 159.175 per gram, namun di bulan Februari harga emas telah mencapai 201.500 per gram. (BPS Kabupaten Sarolangun, 1998). Menambang emas jauh lebih menguntungkan dari pada bertani karet dan *bebalok*. Implikasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia, harga emas melonjak naik dari tahun-tahun sebelumnya, sedangkan harga karet turun, kemudian harga kebutuhan pokok melonjak tajam.

Tingginya pengeluaran dan biaya hidup yang ditanggung penduduk waktu itu, tidak seimbang dengan pendapatan penduduk yang berpenghasilan sebagai penyadap karet. Harga karet di tingkat petani pada tahun 1998 hanya berkisar Rp. 1.050/Kg (Lidya Afrdina, 2011). Untuk lebih jelas tentang harga karet tahun 1991 – 1999 lihat tabel. II:

Tabel 2. Perkembangan Harga Karet di Provinsi Jambi Tahun 1991-1999.

No	Tahun	Harga Karet Rp / Kg	
		Petani	Pedagang
1.	1991	450	490
2.	1992	588	709
3.	1993	670	742
4.	1994	754	780
5.	1995	1.360	1.437
6.	1996	1.200	1.303
7.	1997	997	1.099
8.	1998	1.050	1.140
9.	1999	1.800	1.897

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Daerah Tingkat I Jambi. "Pelayanan dan Penyebarab Informasi Pasar Komoditi Perkebunan Provinsi Daerah Tingkat I Jambi T.A. 1997-1998. Jambi: Dinas Perkebunan Daerah Tingkat I Jambi, 1999, hlm. 10.

Sedangkan penghasilan penduduk yang *bebalok* Rp. 550.000 per bulan, jika dibandingkan dengan penghasilan penambang emas, penghasilan penduduk yang *bebalok* juga lebih kecil. Penghasilan penduduk yang *bebalok* Rp. 750.000 per bulan. Kemudian dikurangi hutang belanja bahan pokok dan rokok selama di hutan sebesar Rp. 200.000, sisanya hanya tinggal Rp. 550.000. Penghasilan total Rp. 550.000 per bulan dibagi menjadi 30 hari, total penghasilan penduduk yang *bebalok* berkisar Rp. 18.300 per hari, atau Rp. 128.100 per minggu. Jika diukur dengan kebutuhan pokok penduduk saat itu Rp. 59.350, maka sisa uang yang dipegang oleh penduduk yang *bebalok* Rp. 68.750. Dari *bebalok*, semua kebutuhan hidup masyarakat tercukupi, termasuk membeli kebutuhan transportasi seperti membeli motor. Namun pada tahun 1999-2000 aktivitas ini ditutup total oleh pemerintah, dengan melakukan razia dan penertiban secara besar-besaran. Akhirnya penduduk yang melakukan penebangan kayu menghentikan pekerjaan ini (BPS Kabupaten Sarolangun, 1998-1999).

Berbeda dengan penduduk yang melakukan penambangan emas, akibat krisis ekonomi harga emas melonjak tinggi. Sepanjang tahun 1998 harga emas selalu mengalami kenaikan. Bulan Januari tahun 1998 harga emas masih berkisar Rp. 159.175

per gram, namun pada bulan Desember tahun 1998 telah mencapai Rp. 210.000 per gram (BPS Sarolangun 1998-1999). Jika disesuaikan dengan ukuran terkecil emas yaitu *seting*, harga emas berkisar 8.750 per *seting*. Lebih jelas mengenai perkembangan harga emas di Kabupaten Sarolangun Bangko sepanjang tahun 1998 lihat tabel III.

Tabel 3. Rata – Rata Harga dan Perubahan Harga Eceran Emas Per bulan di Kabupaten Sarolangun Bangko Tahun 1998.

Bulan	Harga Rata-Rata (Rp/Gram)	Perubahan Perbulan (%)
Januari	159.175	78,83
Februari	201.500	21,01
Maret	231.500	12,95
April	209.000	-10,77
Mei	242.450	13,80
Juni	3.114.855	922,02
Juli	363.005,75	-758,07
Agustus	769.205	100,01
September	388.800	-97,84
Oktober	1.984.375	80,41
November	211.478	-838,34
Desember	210.000	-070

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun Bangko. "Sarolangun Bangko Dalam Angka 1998". Bangko: BPS Kabupaten Sarolangun Bangko, 1999, hlm. 332

Peningkatan aktivitas pertambangan emas rakyat di Sarolangun, khususnya pasca-krisis 1997, dipengaruhi oleh dua faktor utama: meningkatnya harga emas dan adopsi teknologi tambang skala kecil seperti mesin "dompok". Masyarakat yang sebelumnya menggantungkan hidup pada karet mulai beralih ke pertambangan karena peluang pendapatan tunai lebih cepat dan fleksibel. Kegiatan ini umumnya dilakukan di bantaran sungai, seperti di wilayah Batang Asai (Ismanto, 2019).

Namun demikian, transisi ini membawa dampak ekologis signifikan. Kegiatan tambang emas ilegal menyebabkan penurunan kualitas air, perubahan bentang alam, dan hilangnya sumber mata air. Hasil survei di Sarolangun menunjukkan bahwa meskipun masyarakat sadar akan dampak negatif tersebut, keterbatasan lapangan kerja formal

membuat tambang menjadi satu-satunya pilihan yang rasional secara ekonomi (Wibowo et al., 2022).

Penelitian sosial yang lebih dalam juga menunjukkan bahwa relasi sosial dan pola kepemilikan lahan turut berubah sebagai akibat dari ekonomi tambang. Terjadi pergeseran struktur komunitas antara pemilik tambang dan buruh tambang, yang sebelumnya merupakan satu kesatuan petani dalam sistem pertanian komunal (Ismanto, 2019).

Pertama, temuan mengenai kemunculan awal perkebunan karet rakyat di Sarolangun menunjukkan bahwa kolonialisme Belanda memainkan peran penting dalam memperkenalkan tanaman karet ke wilayah Jambi. Seiring dengan meningkatnya permintaan global terhadap karet alam, masyarakat lokal mengadopsi tanaman ini sebagai strategi agribisnis jangka panjang (Putra et al., 2020). Selain itu, pertumbuhan awal perkebunan karet diperkuat oleh pengembangan sistem agroforestri seperti jungle rubber yang memungkinkan masyarakat memadukan kegiatan pertanian dengan pelestarian biodiversitas (Siswo et al.).

Kedua, dalam hal perkembangan perkebunan karet hingga krisis 1997, ditemukan bahwa sistem pemasaran yang tidak efisien dan dominasi tengkulak menurunkan daya tawar petani terhadap harga jual karet (Yanita, et al., 2021). Produktivitas karet rakyat pun masih rendah, rata-rata 1–1,2 ton per hektar per tahun, jauh di bawah potensi optimalnya (Yardha et al., 2022). Studi lain bahkan menunjukkan bahwa mayoritas petani karet di Sarolangun termasuk dalam kategori kesejahteraan rendah karena rendahnya pendapatan riil dan ketergantungan pada satu sumber penghasilan (Nainggolan et al., 2022).

Ketiga, peralihan mata pencaharian masyarakat ke penambangan emas merupakan respons adaptif terhadap krisis ekonomi dan penurunan profitabilitas sektor karet. Di Sarolangun, aktivitas tambang emas rakyat mulai marak sejak akhir 1990-an seiring merosotnya harga karet dan naiknya harga emas di pasar global (Wibowo et al., 2022). Studi oleh Ismanto (2019) juga mengungkap bahwa pertambangan emas tradisional, seperti penggunaan mesin “dompok”, menjadi pilihan utama masyarakat karena mudah diakses dan memberikan hasil ekonomi lebih cepat (Ismanto, 2019). Namun, aktivitas ini tidak lepas dari

permasalahan legalitas dan konflik dengan negara, mengingat sebagian besar penambangan dilakukan tanpa izin resmi.

Secara konseptual, peralihan ini dapat dibaca sebagai bentuk adaptasi ekologis-ekonomi, di mana masyarakat lokal merespons tekanan eksternal melalui strategi diversifikasi mata pencaharian. Dalam teori *livelihood transition*, hal ini mencerminkan pergeseran dari subsistensi agraris menuju ekonomi ekstraktif berbasis sumber daya alam yang lebih likuid (Jayathilake et al., 2024). Namun, transformasi ini juga membawa dampak sosial dan ekologis serius, seperti konflik lahan, degradasi lingkungan, dan kerentanan sosial-ekonomi baru (Utami et al., 2021).

Temuan ini konsisten dengan studi lain di wilayah Jambi yang menunjukkan bahwa tekanan ekonomi seringkali mendorong pergeseran menuju sektor informal dan ilegal yang dianggap lebih menguntungkan dalam jangka pendek (Kuswanto et al., 2019), meskipun konsekuensinya bisa bersifat jangka panjang dan merusak sumber daya alam serta struktur sosial lokal.

Secara teoritis, artikel ini memberikan kontribusi pada penguatan kerangka konseptual *livelihood transition* dalam konteks komunitas agraris tropis yang menghadapi tekanan ekonomi struktural dan keterbatasan institusional. Praktisnya, artikel ini memperlihatkan urgensi desain kebijakan transisi ekonomi pedesaan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan memperhatikan aspek legalitas sumber daya alam.

Meski demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan data lapangan yang bersifat lintas waktu dan kurang mendalamnya telaah mikro terhadap aktor-aktor lokal, termasuk peran perempuan dan generasi muda dalam dinamika transisi. Keterbatasan akses ke data kuantitatif resmi mengenai produksi tambang emas rakyat dan perizinan juga menjadi kendala.

Implikasi dari temuan ini mencakup perlunya intervensi kebijakan berbasis komunitas yang mengintegrasikan revitalisasi sektor perkebunan rakyat melalui teknologi tepat guna, diversifikasi mata pencaharian yang legal dan berkelanjutan, serta program pendidikan dan pelatihan untuk membangun ketahanan ekonomi lokal di luar sektor ekstraktif. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi

dinamika sosiokultural yang lebih kompleks dalam relasi antara masyarakat, negara, dan sumber daya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa peralihan mata pencaharian masyarakat Sarolangun dari petani karet menjadi penambang emas merupakan proses multidimensional yang dipengaruhi oleh dinamika historis, fluktuasi ekonomi, dan tekanan struktural dalam sistem kehidupan pedesaan. Kemunculan awal perkebunan karet rakyat di Sarolangun merupakan bagian dari warisan kolonial yang kemudian berkembang menjadi sistem ekonomi utama masyarakat hingga akhir abad ke-20. Namun, menurunnya produktivitas, ketidakstabilan harga karet, serta terbatasnya dukungan kelembagaan membuat sistem ini rentan terhadap guncangan eksternal. Situasi ini diperparah oleh krisis ekonomi dan perubahan pasar, yang akhirnya mendorong masyarakat untuk mencari sumber pendapatan alternatif melalui penambangan emas rakyat sebagai bentuk strategi adaptasi ekonomi.

Kontribusi utama dari penelitian ini terletak pada penegasan bahwa transisi mata pencaharian tidak hanya berkaitan dengan pertimbangan ekonomi, tetapi juga mencerminkan dinamika struktural dan kultural yang kompleks dalam komunitas agraris. Artikel ini memperluas pemahaman terhadap kerangka livelihood transition dalam konteks masyarakat pascakolonial yang menghadapi krisis sumber daya dan tekanan pasar. Secara praktis, penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya merancang intervensi kebijakan berbasis masyarakat yang mampu menjembatani keberlanjutan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan legalitas aktivitas ekonomi lokal.

Implikasi dari temuan ini membuka ruang bagi penelitian lebih lanjut yang menggali aspek sosial, gender, dan generasi dalam proses peralihan kerja di komunitas rural, serta perlunya pendekatan lintas sektor dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang lebih responsif terhadap dinamika ekonomi mikro masyarakat. Upaya-upaya untuk memperkuat kapasitas kelembagaan petani, membuka akses pasar yang adil, serta menawarkan alternatif ekonomi berkelanjutan menjadi arah strategis yang patut diprioritaskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Sarolangun. *Sarolangun Dalam Angka 2001*. (Sarolangun: BPS Kabupaten Sarolangun, 2002).
- Badan pusat statistik Kabupaten Sarolangun Bangko. *Sarolangun Bangko Dalam Angka 1998*.
- Ismanto. (2019). Making money through ‘dompeng’: Small-scale mining and gold access politics in post-authoritarian Indonesia. *Extractive Industries and Society*, 6(3), 698–707. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2019.05.007>
- Lindayanti. “Perkebunan Karet Rakyat Jambi pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda 1906-1940”. Tesis. Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia, 1993.
- Lidiya Afdina. “Komoditas Karet Dan Kontribusinya Terhadap Revolusi Kemerdekaan di Daerah Jambi 1945-1949”, *Skripsi*, (Jambi: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari, 2008).
- Jayathilake, H. M., Wei, H., & Dewi, S. (2024). Rubber plantation size and global rubber price are linked to deforestation in Indonesia. *Environmental Research Letters*, 19(1). <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ad220f>
- Kuswanto, H., & Alamsyah, M. (2019). The impact of the efficiency of rubber production on the income of smallholder farmers in Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 14(2), 91–98. <https://doi.org/10.24843/JISEP.2019.v14.i02.p01>
- Kuswanto, H., Susanti, E., & Rahmawati, E. (2019). Analysis of rubber farmers’ welfare in Jambi Province. *Jurnal Agriseip*, 20(2), 77–84. <https://doi.org/10.31964/jagr.v20i2.303>
- Ms, M. (2018). Analisis pertumbuhan ekonomi dalam menunjang pembangunan daerah di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 5(2), 71–82. <https://doi.org/10.22437/ppd.v5i2.5889>
- Nainggolan, H. B., Fitri, R., & Lestari, R. (2022). Income and welfare analysis of rubber farmers of Tapanuli Selatan Regency. *International Journal of Economic, Business, and Accounting Research (IJEBAR)*, 6(1), 418–426. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v6i1.4765>
- Putra, H. A., Anugrah Sari, M., & Hakim, A. (2020). Financial analysis of tapped rubber productivity and land use intensity on smallholder farms. *Journal of Tropical Crop Science*, 7(2), 76–81. <https://doi.org/10.25077/jtcs.7.2.76-81.2020>

- Siswo, Y., Yunus, A., & Heryati, E. (2022). Assessing herb layer composition under jungle rubber in Sumatra. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, 23(3), 1226–1234.
<https://doi.org/10.13057/biodiv/d230305>
- Ulul Azmi, “*Penambangan Emas Di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun (1970-2013)*” Tesis. (Padang: Program Pasca Sarjana Universitas Andalas 2016).
- Utami, H. D., Kurniawan, M., & Kartika, J. G. (2021). Soil macroporosity, physical properties and nutrient availability in rubber plantations on ex-forest land. *Journal of Degraded and Mining Lands Management*, 8(2), 2627–2634.
<https://doi.org/10.15243/jdmlm.2021.082.262>
- Wahyuni, B., & Mursal, I. F. (2022). Analisis Masa Pergerakan Nasional Indonesia 1908-1942. *Siginjai: Jurnal Sejarah*, 2(1), 54–66.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22437/js.v2i1.18742>
- Wibowo, A., Ramadan, M., & Zainuddin, M. (2022). Impact of illegal gold mining in Jambi, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 980(1), 012006.
<https://doi.org/10.1088/1755-1315/980/1/012006>
- Wita, G., & Mursal, I. F. (2022). Fenomenologi dalam kajian sosial sebuah studi tentang konstruksi makna. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 6(2), 325-338.
[10.22437/titian.v6i2.21211](https://doi.org/10.22437/titian.v6i2.21211).
- Yanita, Y., Hamid, R., & Salim, R. (2021). Analysis of rubber price differences in Jambi Province. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 9(2), 175–186.
<https://doi.org/10.29244/jai.2021.9.2.175-186>
- Yardha, M. A., Izhar, R. N., & Syam, A. R. (2022). Farming support systems for smallholders rubber productivity improvement in Jambi. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 980(1), 012005.
<https://doi.org/10.1088/1755-1315/980/1/012005>